PENGARUH *WITHHOLDING SYSTEM* DAN *SELF ASSESSMENT SYSTEM* TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang terdaftar di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I Periode 2011-2015)

Disusun oleh :
ANNA MERLIANA

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Komputer Indonesia
Email : annamerliana07@gmail.com

ABSTRACT

Value Added Tax (VAT) as the state revenue collected by Withholding System that gives an authority to the third party to determine the amount of tax payable by the taxpayer and VAT as the state revenue is also collected by the Self Assessment System, which gives authority to the taxpayer to determine the amount of taxes by the taxpayer in according to tax law but VAT revenue declined due to the incompatibility of the tax collection system because Taxpayers tends to minimize the taxpayable.

The purpose of this study are to determine how much the influence of Withholding System that reflected from the amount of tax of PKP and Self Assessment System which is reflected the number of reporting SPT Masa PPN and SSP VAT on the receiving of VAT on KPP that registered at the Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I Bandung.

The method that used in this research are descriptive and verificativen with quantitative approach and using the Regression analysis with purposive sampling.

Based on the results of the analysis showed that Withholding System and Self Assessment System has a significant effect on the receiving of Value Added Tax (VAT).

Keywords: Withholding System, Self Assessment System, Value Added Tax (VAT)

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat berdasarkan Undang – Undang dimana atas pungutan tersebut negara tidak memberikan kontraprestasi secara langsung kepada wajib pajak. Menurut UU KUP No.28 tahun 2007 Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan di gunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penerimaan dari sektor pajak terbagi menjadi dua golongan, yaitu dari pajak langsung contohnya Pajak Penghasilan dan contoh pajak tidak langsung adalah Pajak Pertambahan Nilai, Bea Materai dan Bea balik nama. Dilihat dari segi penerimaan, Pajak Penghasilan dapat membantu negara dalam membiayai pengeluaran, namun tidak semua orang dapat dikenakan PPh. Pajak penghasilan hanya dapat dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang telah berpenghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), akan tetapi hal itu tidak berlaku bagi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), karena pajak tersebut dapat dilimpahkan kepada orang lain sehingga memungkinkan semua orang dapat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Seperti yang kita ketahui bahwa hampir seluruh barang-barang kebutuhan hidup rakyat Indonesia merupakan hasil produksi yang terkena PPN.

Dengan kata lain, hampir semua transaksi di bidang perdagangan, industri dan jasa yang termasuk dalam golongan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak pada prinsipnya terkena PPN. Oleh karena itu walaupun seseorang belum memiliki NPWP namun ia tetap terkena PPN yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak sebagai pihak yang berhak memungut

PPN yang nantinya PPN yang dipungut tersebut akan disetorkan ke kas negara (Zulia Hanum, 2012). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang di tetapkan dengan UU No.18 tahun 2000 merupakan pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai (*Value Added)* yang timbul akibat dipakainya faktor-faktor produksi disetiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen.

Sedangkan menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:235) PPN adalah pajak atas konsumsi umum dalam negeri. PPN hanya dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang dilakukan di dalam negeri. Adapun tarif PPN adalah tunggal atau seragam yaitu 10%, hal ini dimaksudkan untuk kesederhanaan dalam mekanisme pemungutannya. Satu macam tarif untuk seluruh penyerahan Barang kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP), sehingga tidak memerlukan daftar penggolongan barang atau jasa dengan tarif yang berbeda. Dengan mengenakan PPN atas nilai tambah *(added value)* dari Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa kena Pajak (JKP) yang diserahkan oleh pengusaha kena pajak maka kekhawatiran timbul efek pengenaan pajak berganda dapat dihindarkan.

Menurut Mekar Satria Utama, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP menjelaskan, sepanjang Januari hingga Agustus tahun 2015 mengumpulkan penerimaan sebesar Rp 598,27 triliun atau 46,22 persen dari target yang dibebankan Rp 1.294,26 triliun di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015. Realisasi penerimaan ini lebih rendah dibandingkan dengan perolehan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 604 triliun. Sementara itu, fenomena pertumbuhan penerimaan tidak terjadi pada pos penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Impor dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Impor.

Akibat menurunnya impor, setoran PPN Impor turun 12,1 persen menjadi Rp 85,48 triliun dibandingkan dengan periode yang sama di 2014 yang sebesar Rp 97,31 triliun. Alasan yang sama juga terjadi untuk penerimaan PPnBM Impor yang anjlok 24,46 persen, dari Rp 3,9 triliun menjadi Rp 2,94 triliun. Perlambatan ekonomi juga disinyalir turut mengurangi konsumsi barang mewah di dalam negeri. Hal ini tergambar dari setoran PPnBM Dalam Negeri yang tercatat sebesar Rp 5,75 triliun atau turun 16,19 persen dibandingkan dengan perolehan Januari-Agustus 2014 yang sebesar Rp 6,87 triliun. Penurunan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Impor disinyalir turun akibat tidak sesuainya sistem pemungutan pajak dikarenakan Wajib Pajak cenderung meminimalisir pajak terutangnya. (CNN Indonesia, 2015)

Sedangkan Menurut Yuli Kristiono Direktur Intelijen dan Penyidikan Ditjen Pajak mengatakan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak (PPNS Ditjen Pajak) berhasil menangkap SH alias RM selaku Komisaris PT Mitra Sejahtera Logistik, perusahaan penerbit faktur fiktif. Sh kemudian juga ditetapkan sebagai tersangka lantaran diduga membantu penerbitan faktur pajak fiktif atas nama PT Mitra Sejahtera Logistik.Kasus ini telah menjerat salah satu direksi PT Mitra Sejahtera Logistik berinisial MK alias ET dan telah divonis selama satu tahun enam bulan penjara serta denda Rp 44 miliar subsidair tiga bulan kurungan. Modusnya, MK selama 2010-2012 menerbitkan faktur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas nama PT Mitra Sejahtera Logistik tanpa didasarkan transaksi yang sebenarnya, menggunakan faktur PPN dari pihak ketiga yang juga tidak didasarkan pada transaksi yang sebenarnya, dan menyampaikan Pajak Pertambahan Nilai yang tidak benar. Akibat perbuatan itu, negara mengalami kerugian Rp 16,19 miliar.(Nasional.konten.co.id, 2014).

Lebih lanjut Direktur *Institute for Development of Economics and Finance* (Indef) Enny Sri Hartati menilai perubahan sistem pemungutan pajak dengan menggunakan *Self Assesment System* merupakan langkah yang paling efektif untuk mendongkrak kinerja Direktorat Jenderal Pajak. Siklus penerimaan yang selalu rendah dimana penerimaan pajak di triwulan 1 2015 hanya Rp170 triliun. Usaha pemerintah menggenjot penerimaan pajak baik melalui ekstensifikasi maupun intensifikasi ternyata gagal. Penerimaan pajak sepanjang triwulan I 2015 saja masih jauh dari target. Berdasarkan catatan Ditjen Pajak, realisasi setoran pajak dari awal tahun hingga 28 Maret 2015 sebesar Rp 170 triliun. Jumlah ini hanya 13,65 persen dari target sebesar Rp 1.296 triliun. Ini merupakan catatan prestasi terburuk dalam lima tahun terakhir. Tidak dirubahnya sistem pemungutan pajak akan membuat siklus penerimaan pajak tiap triwulan tidak akan

berubah, yang lebih lanjut akan membuat target penerimaan pajak tidak akan tercapai. (Tempo.co, 2015).

Adapun fenomena khusus dalam penelitian ini yaitu menurut Yoyok Satiotomo Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I menjelaskan bahwa penerimaan Pajak Pertambahan Nilai tahun 2015 tidak mencapai target, Kanwil DJP Jawa Barat I menerima Pajak Pertambahan Nilai tahun 2015 sebesar Rp.21,6 triliun atau sekitar 84,13% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.25,6 triliun. Menurut Yoyok Satiotomo bahwa pihaknya telah melakukan upaya-upaya dalam rangka mengamankan target penerimaan Pajak Pertamabahan Nilai dengan menganut sistem pemungutan pajak *Self Assessment System* dimana Ditjen Pajak Kanwil DJP Jawa Barat I telah merealisasikan penerimaan Pajak Pertamabahan Nilai melalui *extra effort* tindak lanjut data perpajakan melalui surat himbauan pembetulan atau Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN kepada Wajib Pajak pada tahun 2015 sebesar Rp.2,5 triliun. (Pajak.go.id, 2016)

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, realisasi penerimaan pajak pada kuartal I tahun ini lebih rendah Rp 4 triliun. Jika realisasi pajak periode yang sama di 2015 sebesar Rp 198 triliun, akan kuartal I ini hanya mencapai Rp 194 triliun. Bambang mengungkapkan, turunnya penerimaan pajak tersebut salah satunya disebabkan rendahnya realisasi pajak dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hal ini diperkirakan lantaran tingkat konsumsi masyarakat masih terhitung minim pada awal tahun ini. Bambangpun mengatakan Kuartal I sedikit di bawah tahun lalu utamanya karena PPN. PPN-nya memang agak rendah, sebagian karena restitusi, sebagian mungkin konsumsi di kuartal I ini belum terlalu kuat. (Liputan 6.com, 2016)

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu menurut Intan PEF (2009) yang berjudul Pengaruh *With Holding Tax System* Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Pengusaha Kena Pajak, hasilnya menunjukan bahwa Penelitian ini hanya melihat pelaksaan sistem murni dari sisi PKP sehingga variabel-variabelnya adalah variabel jumlah PKP yang melaporkan PPN, SPT Masa PPN yang dilaporkan, serta SSP PPN yang disetor yang ketiganya merupakan sarana dan wujud nyata dari *Withholding System,* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Perpajakan yang berlaku. Hasil penelitian telah menunjukan bahwa *Withholding System* dalam penelitian ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan PPN.

Sedangkan hasil penelitian terdahulu menurut Ida Ayu Ivon Trisnayanti (2015) yang berjudul Pengaruh *Self Assessment System,* PemeriksaanPajak, Dan Penagihan Pajak Pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah menunjukkan bahwa peningkatan *self assessment system* akan menyebabkan terjadinya peningkatan penerimaan PPN. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian Prayudi (2010) yang menyatakan bahwa variabel SPT Masa berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPN.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian adalah :

a. Seberapa besar pengaruh *Withholding System* terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
b. Seberapa besar pengaruh *Self Assessment System* terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian yang telah dirumuskan, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah :

a. Untuk menganalisis dan mengkaji pengaruh *With Holding System* terhadap Penerimaan Pajak Penrtambahan Nilai.
b. Untuk menganalisis dan mengkaji pengaruh *Self Assessment System*terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

1.4 Kegunaan Penelitian

Manfaat penelitian menurut (Sugiyono, 2013:305), merupakan dampak dari tercapainya tujuan penelitian, apabila penelitian dapat tercapai dan rumusan masalah terjawab dengan

akurat, memenuhi prinsip dalam penelitian yaitu adanya kegunaan dari penelitian ini, maka penulis membagi menjadi dua segi kegunaan yaitu kegunaan praktis dan kegunaan akademis.

1.4.1 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pemecahan masalah-masalah di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I tentang pengaruh *Withholding System* dan *Self Assessment System* terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

1.4.2 Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini sebagai pembuktian kembali teori perpajakan yang diperoleh di perkuliahan dengan praktik yang terjadi di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I khususnya untuk mengetahui pengaruh *Withholding System* dan *Self Assessment System* terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 *Withholding System*

Sistem pajak ini menekankan kepada pemberian kepercayaan pada pihak ketiga (Konsultan, Auditor, Notaris, Pengacara, dsb). di luar fiskus dan penerima penghasilan untuk memotong atau memungut pajak atas penghasilan yang diberikan oleh pihak ketiga dengan suatu presentase tertentu dari jumlah pembayaran atau transaksi yang dilakukannya dengan penerima penghasilan. Jumlah pajak yang dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga tersebut kemudian dibayarkan kepada negara melalui penyetoran pajak seperti pada aktivitas yang dilakukan di *self assessment* dalam jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan undang-undang. Siti Kurnia Rahayu (2010:105).

2.1.1.1 Pengertian *Withholding System*

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:104) definisi *Withholding System* adalah sebagai berikut:

> "Merupakan sistem perpajakan dimana pihak ketiga baik Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib pajak Badan Dalam Negeri diberi kepercayaan oleh peraturan Perundang-Undangan untuk melaksanakan kewajiban memotong atau memungut pajak penghasilan yang dibayarkan kepada peneriman penghasilan".

2.1.2 *Self Assessment System*

Self Assessment System terdiri dari dua kata bahasa Inggris yakni *self* yang artinya sendiri, dan *to asses* yang menilai, menghitung, menaksir. *Self Assessment System* menyebabkan Wajib Pajak mendapat beban berat karena semua aktivitas pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri. Wajib Pajak harus melaporkan semua informasi yang relevan dalam SPT, menghitung dasar pengenaan pajak, menghitung jumlah pajak yang terutang Siti Kurnia Rahayu (2010:101)

2.1.2.1 Pengertian *Self Assessment System*

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:101) Definisi *Self Assessment System* adalah sebagai berikut:

> "Suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya".

2.1.3 Pajak Pertambahan Nilai

PPN yang ditetapkan dengan UU No.18 tahun 2000 merupakan pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai *(Value Added)* yang timbul akibat dipakainya faktor-faktor produksi disetiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen. (Siti Kurnia Rahayu, 2010).

2.1.3.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan UU Perpajakan No.18 Tahun 2000 Pajak Pertamabahan Nilai adalah sebagai berikut:

"Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas:

1. penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha
2. impor Barang Kena Pajak

3. penyerahan Jasa kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha
4. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud di luar Daerah Pabean di dalam daerah Pabean".

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh *Withholding System* terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut (Intan PEF, 2009) bahwa *Withholding System* berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dijelaskan sebagai berikut:

> "Dari segi teori, hasil penelitian Hasil penelitian telah menunjukkan bahwa *Withholding System* dalam penelitian ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai".

2.2.2 Pengaruh *Self Assessment System* terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut (Gunadi, 2007) bahwa *Self Assessment System* berpengaruh terhadap " Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dijelaskan sebagai berikut:

> "Perubahan sistem pemungutan pajak dari *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*, merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kemandirian salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan dari penerimaan dalam negeri yang berasal dari pajak."

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2010) Hipotesis adalah sebagai berikut :

> "Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian,oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan".

Hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan harus di uji secara empiris. Penulis Merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1 : *Withholding System* berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

H2 : *Self Assessment System* berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian yang Digunakan

Menurut Sugiyono (2012:2) menjelaskan pengertian dari metode penelitian adalah sebagai berikut:

> "Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, seperti rasional, empiris dan sistematis".

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif dan Verifikatif dengan jenis pendekatan kuantitatif.

3.2 Operasionalisasi Variabel

Menurut Nur Indriantoro dalam Narimawati Umi (2010:31) menyatakan bahwa :

> "Operasionalisasi variabel adalah penentuan *construct* sehingga menjadi variable yang dapat diukur. Definisi operasional menjelaskan cara tertentudapat digunakan oleh peneliti dalam mengoperasionalisasikan *construct,*sehingga memungkinkan bagi peneliti yang lain untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran *construct* yang lebih baik."

1. Yang menjadi variabel independent atau variabel bebas pada penelitian ini adalah *Withholding System*(X_1) dan *Self Assessment System*(X_2).
2. Variabel Tidak Bebas atau *Dependent variable* (Y)

Maka yang menjadi variabel dependent atau variabel terikat (Y) pada penelitian ini adalah Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

3.3 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.3.1 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, karena peneliti mengumpulkan informasi dan data langsung dari sumbernya dengan cara melakukan dokumentasi, interview, dan observasi langsung pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I.

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan dua cara, yaitu studi kepustakaan (*Library Research*), studi lapangan(*Field Research*) dan riset internet (*Online Research*). Adapun pengumpulan data sekunder sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini dilakukan untuk pengambilan data yang bersifat teori yang kemudian digunakan sebagai literatur penunjang guna mendukung penelitian yang dilakukan. Data ini diperoleh dari buku-buku sumber yang dapat dijadikan acuan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

2. Studi Lapangan (*Field Research*)

Dalam penulisan laporan ini, penulis mengambil data secara langsung pada objek penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Dokumentasi, yaitu merupakan suatu cara pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I.
b. Wawancara, yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan langsung melalui tanya jawab antara penulis dengan petugas yang berwenang yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.
c. Observasi, yaitu cara pengambilan data dengan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap masalah yang sedang diteliti, dengan maksud untuk membandingkan keterangan-keterangan yang diperoleh dengan kenyataan.
d. Riset Internet (*Online Research*)
   Pengumpulan data berasal dari situs-situs terkait untuk memperoleh tambahan literatur, jurnal dan data lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.4 Populasi, Sampel dan Tempat serta Waktu Penelitian

3.4.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2012:80), yaitu sebagai berikut:

> "Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya"

Berdasarkan pengertian di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa populasi merupakan Jalan obyek atau subyek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah 15 Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang terdaftar di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I selama 5 periode dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015.

3.4.2 Penarikan Sampel

Penarikan sampel dari populasi untuk mewakili populasi disebabkan untuk mengangkat kesimpulan peneliti sebagai suatu yang berlaku bagi populasi.

Menurut Sugiyono (2012:81) pengertian sampel adalah sebagai berikut:

> "Bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut".

Penarikan sample dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *Pruposive Sampling*. Menurut Sugiyono (2012:85) pengertian *Pruposive Sampling* adalah sebagai berikut :

> "*Pruposive Sampling* adalah teknik pengumpulan data sampel dengan pertimbangan tertentu".

Merujuk pada penjelasan sugiyono diatas, maka yang akan menjadi sample dalam penelitian penulis adalah harus memenuhi kriteria – kriteria yang ditetapkan sebagai berikut :

1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang terdaftar di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I.
2. Data yang dimbil adalah 5 tahun dari tahun 2011 sampai tahun 2015 dengan sistem persmester.
3. Perwakilan Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang ada di daerah sekitar Bandung.

Dengan mengambil sampel sebanyak 3 KPP sudah dianggap regresentatif (mewakili) untuk dilakukan uji penelitian.

Menurut Uma Sekaran (2011:136) memberikan acuan umum untuk menentukan ukuran sampel, yaitu sebagai berikut :

> "Dalam penelitian multivariate (termasuk analisis regresi berganda), ukuran sampel adalah 10 kali lebih besar dari jumlah variabel dalam penelitian dan untuk ukuran sampel

minimum adalah 30 yang dipecah ke dalam subsampel adalah tepat untuk kebanyakan penelitian".

3.4.3 Tempat dan Waktu Penelitian

3.4.3.1 Tempat Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, maka penulis mengadakan peneliti diKantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I yang berlokasi di Asia Afrika No.114 Bandung 40232. Telp (022) 4232195.

3.4.3.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dimulai pada bulan Maret 2016 sampai dengan Juli 2016. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti membuat rencana jadwal penelitian yang dimulai dengan tahap persiapan sampai ke tahap akhir yaitu pelaporan hasil penelitian. Secara lebih rinci waktu penelitian dapat dilihat pada tabel 3.3.

3.5 Metode Pengujian Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, di mana data yang diperoleh penulis merupakan data kedua yang telah diolah lebih lanjut dan data yang disajikan oleh pihak lain, Maka metode pengujian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pengujian Asumsi Klasik.

1. Pengujian Asumsi Klasik

Untuk memperoleh hasil yang lebih akurat pada analisis regresi berganda maka dilakukan pengujian asumsi klasik agar hasil yang diperoleh merupakan persamaan regresi yang memiliki sifat *Best Linier Unbiased Estimator* (BLUE).

Beberapa asumsi klasik regresi yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum menggunakan analisis regresi berganda (*Multiple Linear Regression*) sebagai alat untuk menganalisis pengaruh variabel-variabel yang diteliti terdiri atas:

2. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik (Imam Ghozali, 2007: 110).

3. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah terdapat korelasi antar variabel independen dalam model regresi. Dalam model regresi yang baik, seharusnya tidak terdapat korelasi antar variabel independen. Cara mendeteksi keberadaan multikolinieritas dalam model regresi penelitian ini mengikuti salah satu cara menurut Ghozali (2006) yaitu dengan melihat nilai tolerance dan lawannya yaitu *variance inflation factor (VIF).*

4. Uji Autokorelasi

Tujuan uji autokorelasi adalah untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya).

5. **Uji Heteroskedastisitas**

Situasi heteroskedastisitas akan menyebabkan penaksiran koefisien-koefisien regresi menjadi tidak efisien dan hasil taksiran dapat menjadi kurang atau melebihi dari yang semestinya.

3.6 Metode Analisisis Data

Agar penulis dapat menghasilkan data yang dapat dipercaya maka harus dilakukan tahapan analisis dan pengujian hipotesis.

3.6.1 Analisis Regresi Linier Berganda

Dalam penelitian ini, analisis regresi linier berganda digunakan untuk membuktikan sejauh mana hubungan *Withholding System* dan *Self Assessment System* terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

3.6.2 Analisis Korelasi

Korelasi dapat positif atau negatif. Korelasi positif menunjukan arah yang sama antar variable, yaitu jika variable X_1 dan X_2 besar, maka variable Y akan semakin besar. Sebaliknya korelasi negative menunjukan arah yang berlawanan, yaitu jika variable X_1 dan X_2 besar, maka variable Y menjadi kecil.

1. r = -1, menyatakan terdapat hubungan *Withholding System*(X_1) dan *Self Assessment System* (X_2) terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Y) pada Kantor Pelayanan Pajak PratamaKanwil DJP Jawa Barat IBandung sempurna dan negatif.
2. r = 0, menyatakan tidak terdapat hubungan antara*Withholding System* (X_1) dan *Self Assessment System* (X_2) terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Y) pada Kantor Pelayanan Pajak PratamaKanwil DJP Jawa Barat I Bandung.
3. r = +1, menyatakan terdapat hubungan antara *Withholding System* (X_1) dan *Self Assessment System* (X_2) terhadapPenerimaan Pajak Pertambahan Nilaidi Kantor Pelayanan Pajak PratamaKanwil DJP Jawa Barat I Bandung kuat dan positif .

3.6.3 Analisis Determinasi

Persentase peranan semua variabel bebas atas semua nilai variabel bebas ditunjukan oleh besarnya koefisien determinasi (R2). Semakin besar nilainya maka menunjukan bahwa persamaan regresi yang dihasilkan baik intuk mengestimasi variabel terikat. Hasil koefisiensi determinasi ini dapat dilihat dari perhitungan dengan Microsoft/SPSS atau secara manual di dapat dari:

3.6.4 Pengujian Hipotesis

Dalam penelitian ini yang akan di uji adalah seberapa besar pengaruh *Withholding System* dan *Self Assessment System* terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Dengan memperhatikan karakteristik variabel yang akan diuji, maka uji statistik yang akan digunakan adalah melalui perhitungan analisis regresi dan korelasi.

Langkah-langkah analisanya menurut Umi Narimawati (2010:51) sebagai berikut:

3.6.4.1 Pengujian Secara Parsial

Pengujian secara parsial, melakukan uji-t untuk menguji pengaruh masing masing variabel bebas terhadap variabel terikat hipotesis sebagai berikut. Rumus uji t yang digunakan adalah :

Hasilnya dibandingkan dengan tabel t untuk derajat bebas n-k-1 dengan taraf 5%.

a. Perumusan hipotesis penelitian sebagai berikut:
   H_0 ; β = *0, Withholding System*tidak berpengaruh terhadap*Self Assessment System* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kanwil DJP Jawa Barat I Bandung.
   H_1 ; β ≠ 0,*Withholding System* berpengaruh terhadap *Self Assessment System* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kanwil DJP Jawa Barat I Bandung.
   H_0 ; β = 0,*Self Assessment System* tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai padaKantor Pelayanan Pajak Pratama Kanwil DJP Jawa Barat I Bandung..
   H_1 ; β ≠ 0, *Self Assessment System*berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kanwil DJP Jawa Barat I Bandung.
b. Kriteria pengujian
   H_0 ditolak apabila Fhitung>Ftabel (α = 0,05)

Jika menggunkan tingkat kekeliruan (α = 0,01) untuk diuji dua pihak, maka kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis yaitu sebagai berikut:

a. jika thitung ≥ ttabel maka H_0 ada di daerah penolakan, berarti H_0 diterima artinya antara variabel X dan Y ada hubungannya.
b. jika thitung ≥ ttabel maka H_0 ada di daerah penerimaan, berarti H_0 ditolak artinya antara variabel X dan Y ada hubungannya.

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Hasil Analisis Deskriptif

Dalam penelitian ini digunakan alat analisis untuk melihat pengaruh variabel *Withholding System* dan *Self Assessment System* Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dalam penelitian ini dijadikan variabel independen yaitu variabel X yaitu *Withholding System* dan *Self Assessment System* terhadap variabel Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai variabel dependen yaitu variabel Y. Perolehan dari data kuantitatif akan dipaparkan sebagai variabel-variabel terkait dalam penelitian. Data kuantitatif diperoleh berdasarkan variabel dan skala pengukuran yang telah ditetapkan sebelumnya. Data-data yang telah tersedia akan disajikan dalam bentuk tabel deskriptif statistik agar mempermudahkan

dalam menjelaskan hasil penelitian. Berikut disajikan data-data dari variabel dalam penelitian dengan pendekatan tabel deskriptif statistik dengan bantuan *Software SPSS v21*.

4.1.1.1 Variabel *Withholding System* (X_1)

Rata-rata Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan menggunakan *Withholding System* (X_1) yang diukur oleh jumlah Pajak Terutang yang diajukan Pengusaha Kena Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegalega, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta, dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama cianjur mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun. Dari grafik tersebut sesuai hasil deskritpif pada tabel 4.1 diketahui bahwa *withholding system* terendah berada pada KPP Purwakarta tahun 2011 semester 1 dan tertinggi berada pada KPP Purwakarta tahun 2015 semester 2. Sedangkan jika dilihat dari perkembangannya pada KPP Tegalega cenderung mengalami banyak kenaikan *withholding system* begitupun pada KPP Purwakarta dan KPP Cianjur.

4.1.1.2 Variabel *Self Assessment System* (X_2)

Rata-rata Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan menggunakan *Self Assessment System* (X_2) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegalega, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur, dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun. Grafik 4.2 di atas memaparkan distribusi data dan perkembangan *self assessment system* dengan menggunakan indikator Jumlah Pelaporan SPT Masa PPN dan SSP PPN pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegalega, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur, dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta yang terdaftar di Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I Bandung Periode 2011-2015 berdasarkan dua semester pada tiap tahunnya. Dari grafik tersebut sesuai hasil deskriptif pada tabel 4.2 diketahui bahwa *self assessment system* terendah berada pada KPP Purwakarta tahun 2015 semester 1 dan tertinggi berada pada KPP Cianjur tahun 2015 semester 2. Sedangkan jika dilihat dari perkembangannya pada KPP Tegalega cenderung mengalami kenaikan *self assessment system* pada semester pertama ke semester kedua pada tiap tahunnya masing-masing begitupun pada KPP Purwakarta dan KPP Cianjur.

4.1.1.3 Data Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Y)

Rata-rata rata Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Y), mengalami fluktuatif akan tetapi dilihat dari tahun ketahun rata-rata penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) naik cukup signifikan. Distribusi data dan perkembangan penerimaan pajak pertambahan nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegalega, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur, dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta yang terdaftar di Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I Bandung Periode 2011-2015 berdasarkan dua semester pada tiap tahunnya. Dari tabel tersebut sesuai hasil deskritpif pada tabel 4.1 diketahui bahwa penerimaan pajak pertambahan nilai terendah berada pada KPP Cianjur tahun 2011 semester 1. Hal ini disebabkan oleh minimnya tingkat konsumsi masyarakat sehingga mengakibatkan realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai menjadi rendah. Sedangkan pajak pertambahan nilai tertinggi berada pada KPP Tegalega tahun 2015 semester 2. Hal ini disebabkan karena tingkat komsumsi masyarakat meningkat dimana hal tersebut mempengaruhi peningkatan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Apabila jika dilihat dari perkembangannya pada KPP Tegalega cenderung mengalami kenaikan penerimaan pajak pertambahan nilai pada semester pertama ke semester kedua pada tiap tahunnya masing-masing begitupun pada KPP Purwakarta dan KPP Cianjur.

4.1.2 Hasil Analisis Verifikatif

Analisis verifikatif dalam penelitian ini adalah mencari pengaruh *withholding system* dan *self assessment system* terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I, dengan menggunakan metode statistik regresi linier berganda. Untuk menguji apakah terdapat pengaruh *Withholding System* dan *Self Assesment System* terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai maka dilakukan pengujian statistik. Pengujian dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda dengan melalui tahapan sebagai berikut yaitu pengujian uji asumsi klasik (Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas, Uji Heteroskedastistias dan Uji Autokorelasi), analisis regresi linier berganda, analisis korelasi, analisis determinasi dan pengujian hipotesis. Pengujian tersebut dilakukan dengan menggunakan *software SPSS for window 20.0 .*

4.1.2.1 Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan pembentukan model regresi, selanjutnya dilakukan pengujian asumsi terlebih dahulu supaya model yang terbentuk memberikan estimasi yang BLUE (*Best Linier Unbiased Estimated*). Pengujian asumsi ini terdiri atas empat pengujian, yakni uji *normalitas,* uji *multikolinieritas,* uji *heteroskedastistias* dan uji *autokorelasi.*

1. Normalitas

Berdasarkan grafik normalitas menggunakan normal *p-plot* di atas, diketahui bahwa titik-titik menyebar mengikuti garis diagonal (Imam Ghozali, 2007: 110), yang menunjukan bahwa data sudah memenuhi asumsi normalitas terbukti dari normalitas menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* sebagai berikut.

Berdasarkan tabel output uji *kolmogorov smirnov* di atas, diperoleh nilai signifikansi (*Asymp. Sig. (2-tailed)*) sebesar 0,772. Nilai signifikansi (*p-value*) tersebut lebih besar dari 0,05 (Imam Ghozali, 2007: 114), sehingga dapat disimpulkan bahwa data sudah memenuhi asumsi normalitas.

2. Multikolinieritas

Uji *multikolinearitas* dilakukan dengan melihat *tolerance value* dan *variance inflation factor* (VIF) dengan kriteria pengujian nilai *tolerance* harus lebih dari 0,10 dan *Variance Inflation Factor* (VIF) kurang dari 10 (Ghozali, 2006). Berdasarkan output di atas, diketahui bahwa kedua variabel bebas memiliki nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa data tidak memiliki masalah *multikolinieritas.*

3. Heteroskedastisitas

Berdasarkan gambar di atas, diketahui titik-titik yang diperoleh menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola tertentu atau menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada data yang diteliti tidak ditemukan masalah *heteroskedastisitas*.

4. Autokorelasi

Berdasarkan output di atas, diketahui nilai dw sebesar 1,934. Menurut Jonathan Sarwono (2012:28) terjadi autokorelasi jika durbin watson sebesar < 1 dan > 3. Dari nilai-nilai di atas, diketahui bahwa nilai dw (1,934) < 3. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat autokorelasi baik autokorelasi positif maupun autokorelasi negatif dalam model.

Berdasarkan uji asumsi klasik di atas, diketahui bahwa semua pengujian data tidak ditemukan adanya pelanggaran asumsi klasik, sehingga data dapat dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda.

4.1.2.2 Persamaan Regresi Linier Berganda

Berdasarkan hasil output SPSS di atas terlihat nilai koefesien regresi pada nilai *Unstandardized Coefficients "B"*, sehingga diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$\hat{Y} = 27.553.951.721 + 0{,}380X_1 + 503.302{,}958X_2$$

Dari hasil persamaan regresi tersebut masing-masing variabel dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

a. Nilai konstanta sebesar 27.553.951.721, memiliki arti bahwa jika semua variabel bebas yakni *withholding system* dan *self assessment system* bernilai 0 (nol) dan tidak ada perubahan, maka penerimaan pajak pertambahan nilai akan bernilai sebesar Rp.27.553.951.721.
b. Nilai *withholding system* sebesar 0,380, memiliki arti bahwa jika *withholding system* mengalami peningkatan sebesar 1 miliar sedangkan variabel bebas lainnya konstan, maka penerimaan pajak pertambahan nilai akan bertambah sebesar Rp.0,380.
c. Nilai *self assessment system* sebesar 503.302,958, memiliki arti bahwa jika *self assessment system* mengalami peningkatan sebesar 1 sedangkan variabel bebas lainnya konstan, maka penerimaan pajak pertambahan nilai akan bertambah sebesar Rp.503.302,958

4.1.2.3 Analisis Koefesien Korelasi (R)

Berdasarkan tabel, diperoleh informasi bahwa nilai korelasi (R) yang diperoleh antara *withholding system* dan *self assessment system* dengan penerimaan pajak pertambahan nilai adalah sebesar 0,643. Nilai 0,643 menurut Syahri Alhusin dalam Umi Narimawati (2010:50) berada pada interval 0,61 − 0,80 termasuk kategori kuat. Sehingga dapat diketahui bahwa

terdapat hubungan yang kuat antara *withholding system* dan *self assessment system* dengan penerimaan pajak pertambahan nilai. Berikut disajikan analisis korelasi parsial antara variabel bebas dengan variabel terikatnya masing-masing.

Diperoleh informasi bahwa nilai korelasi (R) yang diperoleh antara *withholding system* dengan penerimaan pajak pertambahan nilai adalah sebesar 0,563. Nilai 0,563 menurut Syahri Alhusin dalam Umi Narimawati (2010:50) berada pada interval 0,41 − 0,60 termasuk kategori sedang dengan nilai positif. Sehingga dapat diketahui bahwa terdapat hubungan positif yang sedang antara *withholding system* dengan penerimaan pajak pertambahan nilai, dimana semakin tinggi *withholding system* maka akan diikuti semakin tingginya penerimaan pajak pertambahan nilai.

Diperoleh informasi bahwa nilai korelasi (R) yang diperoleh antara *self assessment system* dengan penerimaan pajak pertambahan nilai adalah sebesar 0,425. Nilai 0,425 menurut Syahri Alhusin dalam Umi Narimawati (2010:50) berada pada interval 0,41 − 0,60 termasuk kategori sedang dengan nilai positif. Sehingga dapat diketahui bahwa terdapat hubungan positif yang sedang antara *self assessment system* dengan penerimaan pajak pertambahan nilai, dimana semakin tinggi *self assessment system* maka akan diikuti semakin tingginya penerimaan pajak pertambahan nilai.

4.1.2.4 Analisis Koefesien Determinasi (r^2)

Koefisien Determinasi (r^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variabel-variabel independen secara simultan dalam memberikan kontribusi atau pengaruh terhadap variabel dependen. Dengan menggunakan *SoftwareSPSS v.21*, diperoleh output sebagai berikut:

Dari tabel hasil output SPSS di atas, diketahui nilai koefisien determinasi atau *R square* sebesar 0,413 atau 41,3%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel *withholding system* dan *self assessment system* secara simultan memberikan pengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai sebesar 41,3%, sedangkan sisanya sebesar 58,7% merupakan pengaruh atau kontribusi dari variabel lain yang tidak diteliti diluar penelitian. Sedangkan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial maka dilakukan perhitungan sebagai berikut :

Dari hasil perhitungan di atas, diketahui bahwa variabel *withholding system* memberikan kontribusi paling dominan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai sebesar 31,7% dan diikuti *self assessment system* sebesar 18,0%.

4.1.2.5 Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Dengan menggunakan program SPSS, diperoleh hasil sebagai berikut:

- **Pengujian X_1:**

H_0 (Hipótesis Nol)

H_0: $\beta_1=0$ *Withholding system* tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I Bandung

H_a: $\beta_1 \neq 0$ *Withholding system* berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I Bandung

Dengan tingkat signifikan (α) sebesar 5%, dk= 27, sehingga diperoleh t_{tabel} dengan uji dua pihak sebesar -2,052 dan 2,052

Kriteria : Tolak H_0 jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} < -t_{tabel,}$ terima H_a

Tolak H_a jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} > -t_{tabel}$, terima H_0

Dari tabel 4.14 output SPSS di atas diperoleh nilai t_{hitung} untuk *withholding system* (X_1) sebesar 3,275 dengan nilai t_{tabel} sebesar 2,052. Dikarenakan nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} (3,275 > 2,052) maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya *withholding system* berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I Bandung. Jika digambarkan, nilai t_{hitung} dan t_{tabel} untuk pengujian parsial X_1 tampak sebagai berikut:

- **Pengujian X_2:**
  H_0 (Hipótesis Nol)
  H_0: $\beta_2=0$ *Self assessment system* tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I.
  H_a: $\beta_2 \neq 0$ *Self assessment system* berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I.

Dengan tingkat signifikan (α) sebesar 5%, dk= 27, sehingga diperoleh t_{tabel} dengan uji dua pihak sebesar -2,052 dan 2,052

Kriteria : Tolak H_0 jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} < -t_{tabel,}$ terima H_a

Tolak H_a jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} > -t_{tabel}$, terima H_0

Dari tabel 4.14 output SPSS di atas diperoleh nilai t_{hitung} untuk *self assessment system* (X_2) sebesar 2,101 dengan nilai t_{tabel} sebesar 2,052. Dikarenakan nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} (2,101 > 2,052) maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya *self assessment system* berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I. Jika digambarkan, nilai t_{hitung} dan t_{tabel} untuk pengujian parsial X_2 tampak sebagai berikut:

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh *Withholding System* Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaruh *withholding system* (X_1) terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (Y) sebesar 0,563 atau setara dengan 31,7% yang menunjukan bahwa arah hubungan berpengaruh positif. sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel *withholding system* berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Artinya dimana disaat *withholding system* meningkat tentu Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama ikut meningkat.

Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin tingginya penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan menggunakan *Withholding System* maka akan meningkatkan pendapatan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) karena semakin optimalnya *Withholding System* dilakukan maka secara otomatis menambah penerimaan pajak pertambahan nilai.

4.2.2 Pengaruh *Self Assessment System* Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaruh *Self Assessment System* (X_2) terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (Y) sebesar 0,425 atua setara dengan 18,0% yang menunjukan bahwa arah hubungan berpengaruh positif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel *Self Assessment System* berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Artinya dimana disaat *Self Assessment System* meningkat tentu Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama ikut meningkat.

Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin tingginya penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan menggunakan *Self Assessment System* maka akan meningkatkan pendapatan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) karena semakin optimalnya *Self Assessmnet System* dilakukan maka secara otomatis menambah penerimaan pajak pertambahan nilai.

V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan fenomena, rumusan masalah hipotesis, dan hasil penelitian mengenai Pengaruh *Withholding System* dan *Self Assessment System* Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang terdaftar di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak I maka peneliti mengambil beberapa kesimpulan sesuai rumusan masalah yang dicari sebagai berikut :

1. *Withholding system* berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I. Yang berarti semakin baik penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dengan menggunakan *Withholding System* maka akan tinggi pendapatan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Namun tidak sesuainya sistem pemungutan pajak dikarenakan Wajib Pajak

cenderung meminimalisir pajak terutangnya dan adapun Wajib Pajak yang menggunakan faktur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari pihak ketiga yang juga tidak didasarkan pada transaksi yang sebenarnya yang berakibat pada Negara mengalami kerugian.

2. *Self Assesment System* berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I. Yang berarti semakin baik penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dengan menggunakan *Self Assesment System* maka akan tinggi pendapatan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Namun dengan menggunakan *Self Assessment System* masih saja merendah, tidak sesuainya sistem pemungutan pajak dan kurangnya sosialisasi Sistem Pemungutan Pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak serta merendahnya usaha pemerintah menggenjot penerimaan pajak baik melalui ekstensifikasi maupun intensifikasi ternyata gagal, tidak dirubahnya sistem pemungutan pajak akan membuat siklus penerimaan pajak tidak akan berubah,usaha pemerintah menggenjot penerimaan pajak baik melalui ekstensifikasi maupun intensifikasi ternyata gagal tidak dirubahnya sistem pemungutan pajak akan membuat siklus penerimaan pajak tidak akan berubah, yang lebih lanjut akan membuat target penerimaan pajak tidak akan tercapai. Tetapi *Withholding System* dibandingkan *Self Assessment System* lebih meningkat karena disaat *Self Assessment System* diterapkan dibutuhkan kesadaran Wajib Pajak.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas dengan Pengaruh *Withholding System* dan *Self Assessment System* Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang terdaftar di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut :

5.2.1 Saran Praktis

1. Untuk meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan menggunakan *Withholding System* yang belum optimal karena partisipasi Pihak Ketiga sangat dibutuhkan, sebaiknya Kantor Pelayanan Pajak Pratama memperbaiki tingkat pelayanan dengan cara melakukan sosialisasi kepada semua Wajib Pajak agar perencanaan atau target penerimaan pajak pertambahan nilai dapat tercapai dan terealisasikan. Untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak agar menggunakan cara sistem pemungutan pajak yaitu dengan cara mengarahkan Wajib Pajak atau memeberikan informasi perpajakan yang terbaru agar Wajib Pajak mematuhi kewajiban perpajakannya.
2. Untuk meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan menggunakan *Self Assesment System* yang belum optimal karena partisipasi dan kesadaran Wajib Pajak sangat dibutuhkan, sebaiknya Kantor Pelayanan Pajak Pratama memperbaiki tingkat pelayanan dengan cara melakukan himbauan kepada Wajib Pajak mengenai penggunaan e-SPT. Karena dengan adanya e-SPT, membuat Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat dan aman, karena lampiran dalam bentuk media CD/disket serta membuat data perpajakan terorganisir dengan baik. Selain itu Sistem aplikasi e-SPT mengorganisasikan data perpajakan perusahaan dengan baik dan sistematis dengan penghitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer dan memberi kemudahan bagi Wajib Pajak dan kantor Pelayanan Pajak Pratama.

5.2.2 Saran Akademis

1. Pengembangan Ilmu, diharapkan hasil penelitian ini sebagai pembuktian kembali dari teori-teori dan hasil penelitian terdahulu dan untuk pengembangan ilmu terkait dengan pengaruh *Withholding System* dan Self *Assessment System* Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
2. Bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian dengan topik yang sama dengan menambahkan indikator yang tidak digunakan dalam penelitian ini. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan metode penelitian yang sama yaitu Regresi Berganda, tetapi dengan unit analisis, populasi, dan sampel yang digunakan berbeda agar diperoleh kesimpulan yang mendukung dan memperkuat teori dan konsep yang telah dibangun sebelumnya oleh peneliti-peneliti sebelumnya.

VI DAFTAR PUSTAKA

Andi Prastowo. 2012. *Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif.* Yogyakarta: Diva Press.

Gujarati, D.N. 2004 *Essentials of Econometrics, Third Edition, McGraw-Hill International Edition*, (terjemahan: Mulyadi, J.A., dkk, 2007, Dasar-dasar Ekonometrika Jilid I dan II) Erlangga: Jakarta.

Imam Ghozali. 2007. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Ika Nursanti. 2013*. Pengaruh Self Assessment System dan Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Volume 1 Nomor 1, Januari 2013)

Intan Pef. 2009. *Pengaruh With Holding System Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Pengusaha Kena Pajak. Studi Kasus KPP Pratama Medan Barat.*Makalah disajikan dalam Proposal Skripsi bagi Mahasiswa Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara. Medan.

Ida Ayu Ivon Trisnayant dan I Ketut Jati. 2015. *Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (ppn)*. ISSN: 2302-8556 e-jurnal akuntansi universitas udayana 13.1 (2015): 292-310)

Jonathan Sarwono, 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif.*
Yogyakarta; Graha Ilmu,

Mardiasmo. *Perpajakan Edisi Revisi 2011* .Yogyakarta: Penerbit Andi.
Siti Kurnia Rahayu. 2010. *Perpajakan Indonesia. Konsep dan Aspek Fornal.* Yogyakarta:Graha ilmu

Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati. 2010. *Perpajakan Indonesia. Teori dan Teknis Perhitungan*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Siti Resmi. 2014. *Perpajakan. Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta

Tata Sutabri. 2012. *Analisis Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi
Umi Narimawati. 2010. *Penulisan Karya Ilmiah*. Jakarta: Penerbit Genesis.

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia.* Jakarta: Salemba Empat

Widi Widodo dan Dedi Djefris. 2008. *Tax Payer's Right. Apa Yang Perlu Kita Ketahui Tentang Hak-hak Wajib Pajak?*. Bandung: Alfabeta

Yakub. 2012. *Pengantar Sistem Informasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Zulia Hanum. 2012. *Pengaruh Withholding Tax System Pada Pengusaha Kena*

Pajak
Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. *Studi Kasus KPP Pratama Medan Petisah.* Jurnal Ilmiah Ekonomikawan ISSN: 1693-7600 Edisi 11 Des 2012)

LAMPIRAN

Tabel 3.1

Operasionalisasi Variabel

Variabel	Konsep	Indikator	Skala
Withholding System (X1)	Menurut Mardiasmo (2012:7)*Witholding System* adalah sebagai berikut: "Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya yaitu Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak". Sedangkan menurut Waluyo (2011:17) definisi *Withholding System* adalah sebagai berikut: "Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak".	1. Jumlah Pajak Terutang, (Mardiasmo, 2012:7) dan Waluyo (2011:17)	Rasio
Self Assessment System (X2)	Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:101) "*Self Assessment System* menyebabkan Wajib Pajak mendapat beban berat karena semua aktivitas pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri. Wajib Pajak harus melaporkan semua informasi yang relevan dalam SPT, menghitung dasar pengenaan pajak, menghitung jumlah pajak yang terutang". Menurut (Gunadi, 2005) menyatakan bahwa: "*SelfAssessment System* memberikankepercayaan penuh kepada Wajib Pajak, makaselayaknya diimbangi dengan adanyapengawasan yang diberikan tidakdisalahgunakan. Ini menjadikan tugasDirektorat Jenderal Pajak untuk menetapkanpajak setiap Wajib Pajak menjadi berkurang.Dalam prinsip *Self Assesment System*,penentuan besarnya pajak terutangdipercayakan kepada Wajib Pajak sendirimelalui Surat Pemberitahuan (SPT) yangdisampaikan". Menurut Nurmantu (2005:108) menyatakan bahwa :	1. Jumlah Pelaporan SPT Masa PPN (Siti Kurnia Rahayu, 2010:101) dan (Gunadi, 2005) 2. Jumlah Pelaporan Surat Setoran Pajak (SSP) PPN Nurmantu (2005:108) dan (Kresna, 2014:3)	Rasio

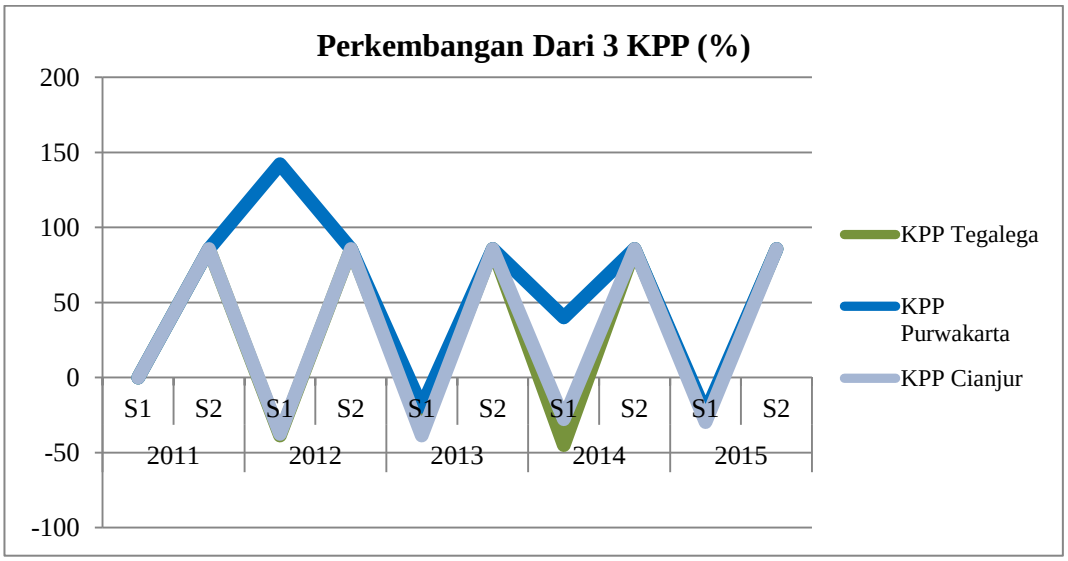
	"Self Assessment System adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan Wajib Pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. Dalam hal ini dikenal dengan 5M, yakni mendaftarkan diri di KPP untuk mendapatkan NPWP, menghitung dan atau memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terutang, menyetor pajak tersebut ke Bank/Kantor Giro Pos dan melaporkan penyetoran tersebut kepada DJP melalui SSP (Surat Setoran Pajak), serta menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang melalui pengisian SPT dengan baik dan benar". Menurut Kresna (2014:3) menyatakan bahwa Siklus Self Assessment System meliputi: - Wajib Pajak yang dalam kegiatan usahanya dikenai pajak yang dalam kegiatan usahanya dikenai pajak berdasarkan UU PPN 1984 dan perubahannya. - Wajib melaporkan usahanya pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk dikukuhkan sebagai PKP. - Menghitung dan/atau memperhitungkan sendiri jumlah PPN yang terutang. - Memungut dan/atau menyetor PPN yang terutang ke Penerima Pembayaran yang telah ditetapkan dengan media Surat Setoran Pajak (SSP).		
Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Y)	Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:235) definisi Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut: "Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas konsumsi umum dalam negeri berupa Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak." Definisi Pajak Pertamabahan Nilai menurut Waluyo (2011:46) menyatakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebagai berikut : "Pajak yang dikenakan atas komsumsi di dalam negeri (di Daerah Pabean) baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa".	1. Jumlah Realisasi Penerimaan PPN Siti Kurnia rahayu (2010:235) dan Waluyo (2011:46)	Rasio

Tabel 4.1

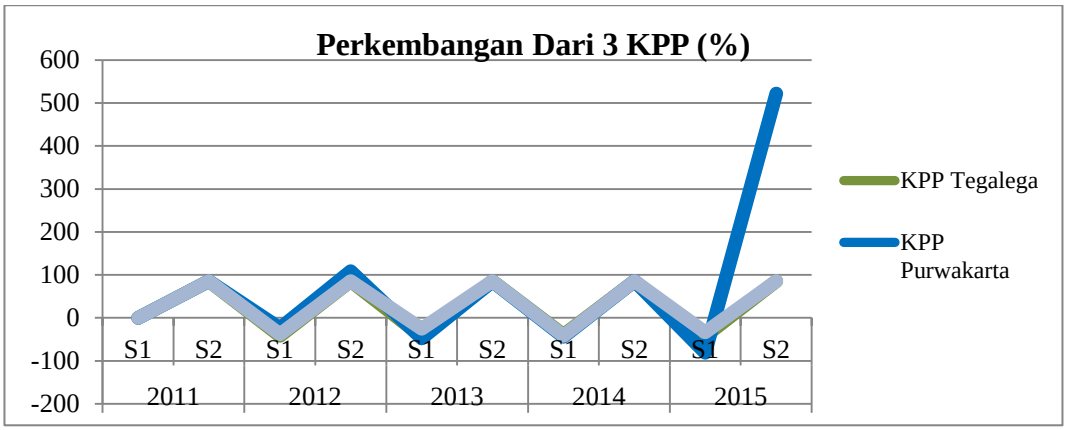
Deskriptif Variabel Penelitian

Descriptive Statistics

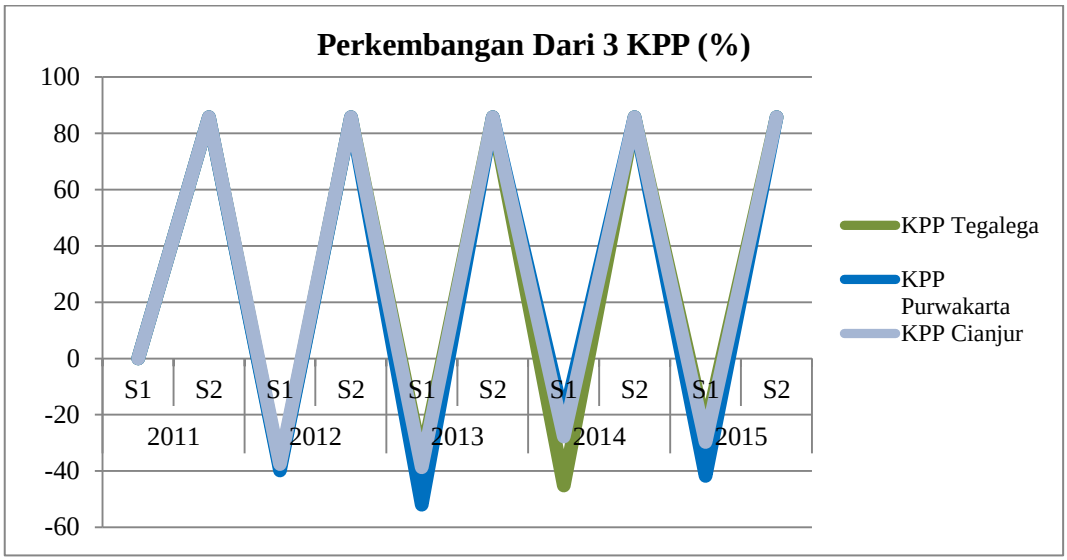
	N	Minimum	Maximum	Mean
Withholding System (X1)	30	5259290254	243194894743.0	80842550595.27
Self Assessment System (X2)	30	8402.0	138239.5	51364.50
Penerimaan PPN (Y)	30	20428402335	212899876316.4	84098740625.77
Valid N (listwise)	30			



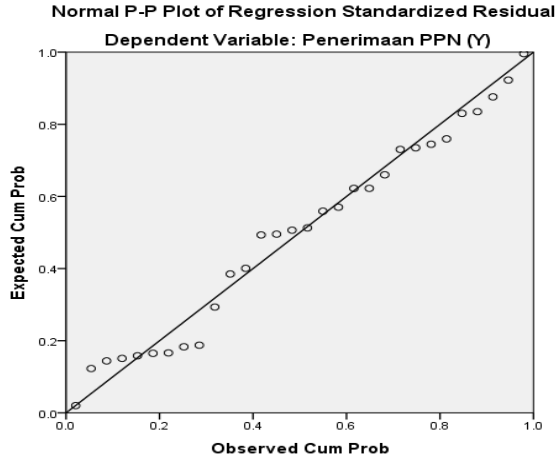
Gambar 4.1 Grafik *Withholding System*



Gambar 4.2 Grafik *Self Assesment System*



Gambar 4.3 Grafik Pajak Pertambahan Nilai



Gambar 4.4 Uji Normalitas

Tabel 4.5 Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		30
Normal Parameters[a,b]	Mean	-.0000063
	Std. Deviation	35299974241.6
Most Extreme Differences	Absolute	.121
	Positive	.121
	Negative	-.093
Kolmogorov-Smirnov Z		.663
Asymp. Sig. (2-tailed)		**.772**

a. Test distribution is Normal.

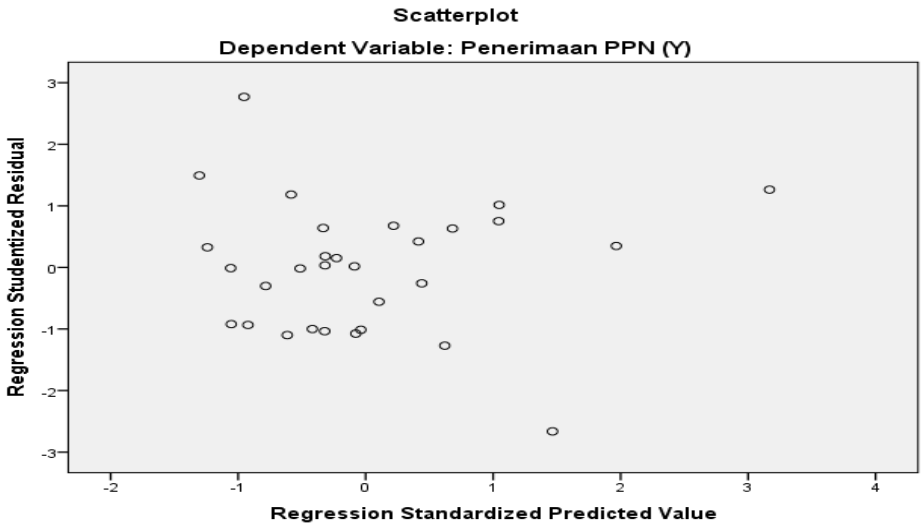
b. Calculated from data.

Tabel 4.6 Uji Multikolinieritas

Coefficients[a]

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Withholding System (X1)	.953	1.049
	Self Assessment System (X2)	.953	1.049

a. Dependent Variable: Penerimaan PPN (Y)



Gambar 4.5 Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4.7 Uji Autokorelasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.643[a]	.413	.370	36584026702	1.934

a. Predictors: (Constant), Self Assessment System (X2), Withholding System (X1)

b. Dependent Variable: Penerimaan PPN (Y)

Tabel 4.8 Koefisien Regresi Berganda

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	27553951721	1.53E+10		1.802	.083
	Withholding System (X1)	.380	.116	.495	3.275	.003
	Self Assessment System (X2)	503302.958	239503.8	.317	2.101	.045

a. Dependent Variable: Penerimaan PPN (Y)

Tabel 4.9 Koefisien Korelasi Berganda

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.643[a]	.413	.370	36584026702

a. Predictors: (Constant), Self Assessment System (X2), Withholding System (X1)

b. Dependent Variable: Penerimaan PPN (Y)

Tabel 4.10 Koefisien Korelasi Parsial X_1

Correlations

		Withholding System (X1)	Penerimaan PPN (Y)
Withholding System (X1)	Pearson Correlation	1	.563**
	Sig. (2-tailed)		.001
	N	30	30
Penerimaan PPN (Y)	Pearson Correlation	.563**	1
	Sig. (2-tailed)	.001	
	N	30	30

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Tabel 4.11 Koefisien Korelasi Parsial X_2

Correlations

		Self Assessment System (X2)	Penerimaan PPN (Y)
Self Assessment System (X2)	Pearson Correlation	1	.425*
	Sig. (2-tailed)		.019
	N	30	30
Penerimaan PPN (Y)	Pearson Correlation	.425*	1
	Sig. (2-tailed)	.019	
	N	30	30

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Tabel 4.12 Koefisien Determinasi (R-*square*)

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.643[a]	.413	.370	36584026702

a. Predictors: (Constant), Self Assessment System (X2), Withholding System (X1)

b. Dependent Variable: Penerimaan PPN (Y)

Tabel 4.13 Koefisien Determinasi Parsial

Correlations

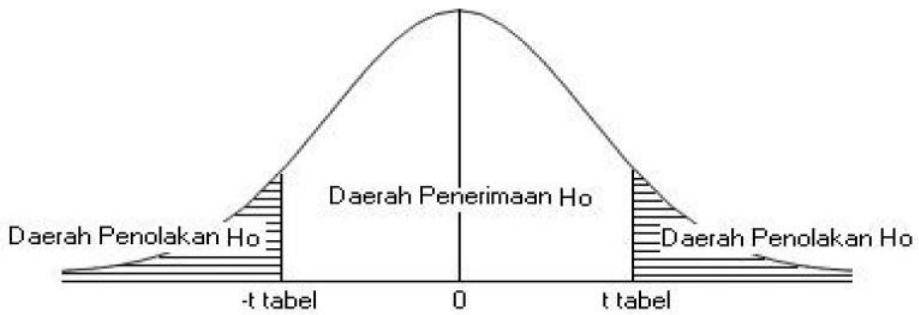
		Penerimaan PPN (Y)
Withholding System (X1)	Pearson Correlation	.563
Self Assessment System (X2)	Pearson Correlation	.425

Tabel 4.14 Uji Hipotesis Parsial (Uji t)

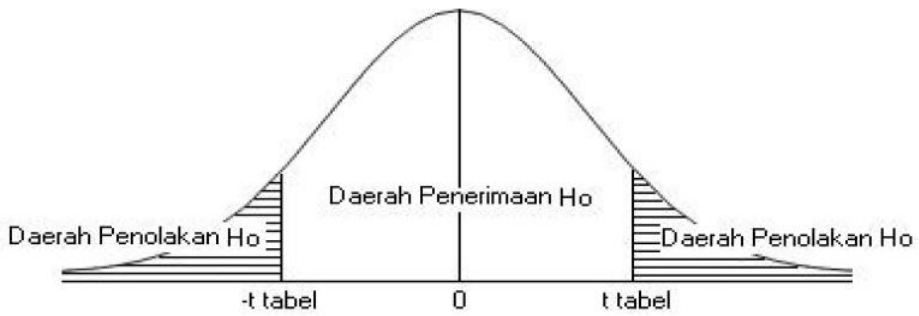
Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	27553951721	1.53E+10		1.802	.083
	Withholding System (X1)	.380	.116	.495	3.275	.003
	Self Assessment System (X2)	503302.958	239503.8	.317	2.101	.045

a. Dependent Variable: Penerimaan PPN (Y)



Gambar 4.6 Kurva Uji Hipotesis Parsial X_1



Gambar 4.7 Kurva Uji Hipotesis Parsial X_2